



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA**

JL. BOULEVART TAHUNA, KEC. TAHUNA TIMUR, KAB.KEPL. SANGIHE 95814
TELEPON (0432) 24425, FAKSIMILE (0432) 24425
LAMAM www.kkp.go.id, SUREL psdkp.tahuna@kkp.go.id

Nomor : B.660/PSDKPSta.6/TU.210/IV/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

14 April 2023

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Di Tempat

Dalam rangka pengukuran capaian kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Bayu Y. Suharto



Laporan Kinerja Triwulan I 2023



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
**Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap semua capaian kinerja dan aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada triwulan berjalan di tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyusunan sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.



Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dan seluruh pihak terkait. Semoga motivasi yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tahuna, 14 April 2023
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna



Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19850616 200701 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. LKj ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2023.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2023 terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Sasaran Kinerja (ISK) yang harus dilaksanakan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan. Dari 20 ISK tersebut telah terbagi menjadi 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 13 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 106,64% dengan predikat "Baik". Ketujuh SK tersebut antara lain: SK1.1. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif, SK1.2. Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan, SK2.1. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan, SK3.1. Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan, SK4.1. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, SK4.2. Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas, dan SK5.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP.

Alokasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna TA. 2023 sebesar Rp. 19.386.793.000,- dan Realisasi Anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.510.610.170,- dengan persentase capaian sebesar 18,11%.



Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai sepenuhnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna	4
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2023	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia Dan Keuangan	77
BAB IV. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023	13
Tabel 2	Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna	17
Tabel 3	Target ISK 1.1.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas"	21
Tabel 4	Hasil Capaian ISK 1.1.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" Triwulan I Tahun 2023	22
Tabel 5	Perhitungan "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" Triwulan I Tahun 2023	22
Tabel 6	Target ISK 1.1.2 "Indeks kinerja operasional speedboat pengawas"	25
Tabel 7	Hasil Capaian ISK 1.1.2 "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 8	Perhitungan "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" Triwulan I Tahun 2023	26
Tabel 9	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1.1 "Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif"	29
Tabel 10	Target ISK 1.2.1 "Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	31
Tabel 11	Hasil Capaian ISK 1.2.1 "Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	31
Tabel 12	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1.2 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan"	32
Tabel 13	Target Kinerja Komponen ISK 2.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan"	33
Tabel 14	Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK 2.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan" Triwulan I Tahun 2023	34
Tabel 15	Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2023	36
Tabel 16	Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2023	38
Tabel 17	Pelaku Usaha Pemanfaatan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2023	39



Tabel 18	Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelarangan Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhanannya Triwulan I Tahun 2023	40
Tabel 19	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2.1 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan"	42
Tabel 20	Target Kinerja Komponen ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan"	43
Tabel 21	Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan" Triwulan I Tahun 2023	44
Tabel 22	Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023	47
Tabel 23	Dokumen Nomor Perizinan Berusaha Kapal Perikanan dalam Penangkapan Ikan Terukur yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023	47
Tabel 24	Pengawasan Insidental Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023	49
Tabel 25	Dokumen Nomor Induk Berusaha Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023 ..	49
Tabel 26	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3.1 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan"	50
Tabel 27	Target ISK 4.1.1 "Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	51
Tabel 28	Hasil Capaian ISK 4.1.1 "Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	51
Tabel 29	Data Peneanaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023	52
Tabel 30	Dokumentasi Peneanaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023	53
Tabel 31	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3.1 "Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan"	53
Tabel 32	Target ISK 5.1.1 "Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	54
Tabel 33	Hasil Capaian ISK 4.2.1 "Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	55
Tabel 34	Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 4.2 "Terselenggaranya penyidikan .. tindak pidana kelautan dan perikanan"	56



Tabel 35 Target ISK 5.1.1 "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	57
Tabel 36 Hasil Capaian ISK 5.1.1."Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	57
Tabel 37 Target ISK 5.1.2 "Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	59
Tabel 38 Hasil Capaian ISK 5.1.2 "Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	59
Tabel 39 Target ISK 5.1.3 "Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	60
Tabel 40 Hasil Capaian ISK 5.1.3 "Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	60
Tabel 41 Target ISK 5.1.4 "Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	61
Tabel 42 Hasil Capaian ISK 5.1.4 "Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	62
Tabel 43 Target ISK 5.1.5 "Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	63
Tabel 44 Hasil Capaian ISK 5.1.5 "Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	63
Tabel 45 Target ISK 5.1.6 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"	64
Tabel 46 Hasil Capaian ISK 5.1.6 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" Triwulan I Tahun 2023	65
Tabel 47 Target ISK 5.1.7 "Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	66
Tabel 48 Hasil Capaian ISK 5.1.7 "Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023	66
Tabel 49 Target ISK 5.1.8 "Jumlah inovasi yang dihasilkan"	67
Tabel 50 Hasil Capaian ISK 5.1.8 "Jumlah inovasi yang dihasilkan" Triwulan I Tahun 2023	67
Tabel 51 Target ISK 5.1.9 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	68



Tabel 52 Hasil Capaian ISK 5.1.9 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023	69
Tabel 53 Target ISK 5.1.10 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMNlingkup Stasiun PSDKP Tahuna”	70
Tabel 54 Hasil Capaian ISK 5.1.10 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023	70
Tabel 55 Target ISK 5.1.11 “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”	71
Tabel 56 Hasil Capaian ISK 5.1.11 “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023	72
Tabel 57 Target ISK 5.1.12 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”	73
Tabel 58 Hasil Capaian ISK 5.1.12 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023	73
Tabel 59 Target ISK 5.1.12 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”	74
Tabel 60 Hasil Capaian ISK 5.1.13 “Nilai Kinerja Anggaran NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023	74
Tabel 61 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” pada Stasiun PSDKP Tahuna	75
Tabel 62 Komposisi Golongan dan Kualifikasi Pendidikan ASN Stasiun PSDKP Tahuna	77
Tabel 63 Lokasi Penempatan ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	77
Tabel 64 Daftar PPNPN di UPT Stasiun PSDKP Tahuna	79
Tabel 65 Rincian Realisasi Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna	79
Tabel 66 Rekomendasi Penutup Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna	7
Gambar 2	Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kepl. Talaud, dan Wilker PSDKP Salibabu	8
Gambar 3	Kapal Pengawas KP. Hiu 15, Speedboat Pengawasan Napoleon 039, dan Napoleon 017	8
Gambar 4	Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	20
Gambar 5	Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2023	24
Gambar 6	Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Triwulan I Tahun 2023	29
Gambar 7	Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah Triwulan I Tahun 2023	37
Gambar 8	Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi Triwulan I Tahun 2023	38
Gambar 9	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelarangan Destructive Fishing Triwulan I Tahun 2023	41
Gambar 10	Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Triwulan I Tahun 2023	48
Gambar 11	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023	58
Gambar 12	Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan SPIP Sebagai Salah Satu Kegiatan Manajemen Risiko	61
Gambar 13	Nilai Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2023	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat elemen tersebut sehingga dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Triwulan I Tahun 2023 kepada para *stakeholder* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Dengan demikian LKj ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan



dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 Strategi Ekonomi Biru sebagai Langkah Indonesia menjaga ketahanan pangan dunia antara lain :

1. Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
3. Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
5. Program "Bulan Cinta Laut" dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Guna mendukung program tersebut, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap beberapa isu terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP, yaitu:

1. Subsektor Penangkapan Ikan

- Tren kasus IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna beberapa tahun terakhir sekitar 2 kasus;
- Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI – Filipina;
- Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pencapaian target PNBPN sektor kelautan dan perikanan;



- Potensi pelanggaran daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh KII;
 - Kuota Penangkapan dalam Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Subsektor Pembudidayaan Ikan
- Belum adanya unit budidaya ikan yang terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
 - Penggunaan pakan dan obat ikan yang tidak terdaftar dalam register;
 - Kegiatan pembudidayaan dan pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan
- Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang diperiksa;
 - Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya;
 - Kegiatan pengolahan ikan yang tidak sesuai dengan standar GMP dan SSOP.
4. Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan
- Belum adanya pelaku usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;



- Kegiatan lalu lintas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Potensi tindak pidana penyelundupan pada kegiatan Lalu Lintas Produk Perikanan Tertentu (Benih Bening Lobster).
5. Pencemaran Perairan
 - Potensi pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah hasil kegiatan perikanan maupun non perikanan.
 6. Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)
 - Kegiatan perikanan yang bersifat merusak habitat serta kelestariannya, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestariannya (*over fishing*), penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, penggunaan kompresor pada kegiatan penangkapan ikan, serta penyetruman ikan.
 7. Pemanfaatan Ikan yang Dilindungi
 - Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait ikan serta biota laut yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dalam pemanfaatannya;
 - Terdapat beberapa spesies ikan dan biota laut yang minim populasinya dan terancam punah.
 8. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - Penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak lain (perseorangan dan swasta) baik berupa PMA/PMDN yang diharuskan melalui mekanisme perizinan;
 - Potensi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut dampak dari kegiatan pemanfaatannya;
 - Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016



tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Stasiun PSDKP Tahuna menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- d) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Tata Usaha, dengan dibantu Pelaksana Koordinasi Bagian Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Pelaksana Koordinasi Bagian Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

- a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan



melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Bagian Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran :

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Bagian Sarana dan Prasarana :

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Kelompok Jabatan Fungsional :

Fungsional pengawas perikanan melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK Fungsional yang telah ditetapkan.

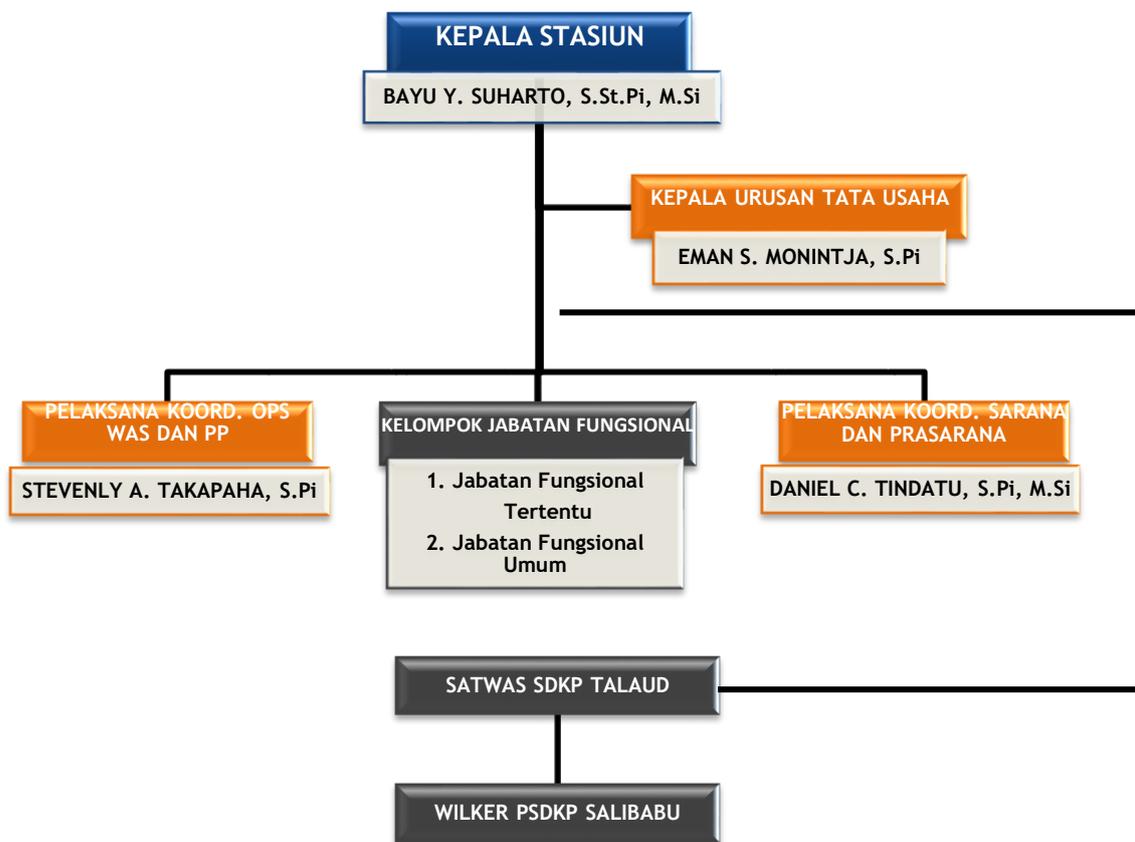
f) Satuan Pengawasan SDKP :

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator.



Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, yang meliputi 1 Satwas SDKP (Satwas SDKP Talaud) dan 1 Wilker PSDKP (Wilker PSDKP Salibabu). Adapun grafik struktur organisasi Stasiun PSDKP Tahuna dapat lihat pada **Gambar 1**. dibawah ini.

Gambar 1
Struktur Organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna





Gambar 2

Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kepl. Talaud, dan Wilker PSDKP Salibabu



Stasiun PSDKP Tahuna

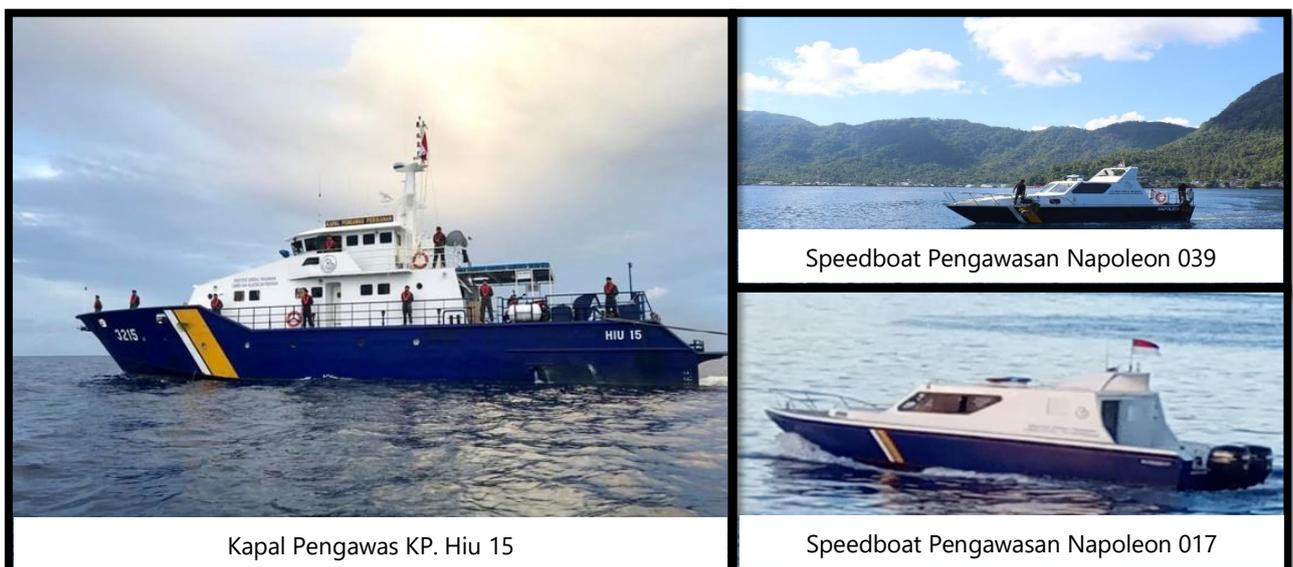
Satwas SDKP Kepl. Talaud

Wilker PSDKP Salibabu

Selain itu, untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Stasiun PSDKP Tahuna dibekali dengan armada pengawasan berupa 1 unit Kapal Pengawasan KP. Hiu 15, dan 2 unit Speedboat Pengawasan Napoleon 039 dibawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna dan Napoleon 017 dibawah kendali Satwas SDKP Talaud.

Gambar 3

Kapal Pengawas KP. Hiu 15, Speedboat Pengawasan Napoleon 039, dan Napoleon 017



Kapal Pengawas KP. Hiu 15

Speedboat Pengawasan Napoleon 039

Speedboat Pengawasan Napoleon 017



Sistematika Penyajian LKj Triwulan I Tahun 2023 UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta data umum organisasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna untuk periode 2021-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian hasil Pengukuran Kinerja, evaluasi dan analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

4. Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Triwulan I Tahun 2023 UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Renstra Ditjen. PSDKP 2021-2024 Ditjen PSDKP Tahun 2021-2024; (2) Rencana Kerja; dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PSDKP 2021-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2021 – 2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2021 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:



1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerjadan perjanjian kinerja Ditjen PSDKP.

Arah kebijakan pengawasan SDKP tentunya harus ditindaklanjuti dan diterjemahkan pada kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Satker dalam sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja Direktorat Jenderal PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Direktorat Jenderal PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara;
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speed boat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.



3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK)
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi)
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (Kejaksaan Agung);
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - e. Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di lingkaran Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintasi batas ke perairan negara lain;



- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawas SDKP melalui POKMASWAS;
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar"
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan":
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.
- g. Membuat inovasi dalam pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Stasiun PSDKP Tahuna secara khusus memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hierarki, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 1**. dibawah ini:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas [Indeks]	87,6
		ISK1.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [Indeks]	87,6
SK1.2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan	ISK1.2.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	SDKP yang sesuai ketentuan			
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan [%]	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan [%]	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	ISK4.2.1	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	80
		ISK5.1.2	Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	75



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK5.1.3	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	78
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	90
		ISK5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%]	75
		ISK5.1.7	Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai]	21
		ISK5.1.8	Jumlah inovasi yang dihasilkan [Inovasi]	1
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	92
		ISK5.1.10	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5
		ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	
		ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	82

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi pada Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2023

Stasiun PSDKP Tahuna pada akhir Triwulan I Tahun 2023 mendapatkan skor kinerja sebesar 106,30% dengan ditunjukkan pada indikator yang berwarna hijau pada aplikasi *Kinerjaku* dengan predikat "Baik". Stasiun PSDKP Tahuna tetap mempertahankan tren positif dalam perolehan capaian kinerja dengan mendapatkan capaian >100% seperti tahun sebelumnya. Secara terperinci dan spesifik capaian kinerja Stasiun PSDKP Tahuna pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui penjabaran informasi sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023 ditabulasikan pada **Tabel 2**. dibawah ini.

Tabel 2

Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna

Stasiun PSDKP Tahuna
 Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si
 19850616 200701 1 003
 Kepala Stasiun PSDKP Tahuna

Level II
 Periode Triwulan I Tahun 2023
 106,64%

Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Triwulan I Tahun 2023	Capaian Triwulan I Tahun 2023	%	Status
SK 1.1 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif			114,16	●
ISK 1.1.1 Indeks kinerja operasi kapal pengawas [Indeks]	87,60	100,00	114,16	●



Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Triwulan I Tahun 2023	Capaian Triwulan I Tahun 2023	%	Status
ISK 1.1.2 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [Indeks]	87,60	100,00	114,16	●
SK 1.2 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			-	●
ISK 1.2.1 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	-	-	-	●
SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan			100,00	●
ISK 2.1.1 Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan [%]	100,00	100,00	100,00	●
SK 3.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan			100,00	●
ISK 3.1.1 Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan [%]	100,00	100,00	100,00	●
SK 4.1 Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan			108,93	●
ISK 4.1.1 Persentase penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	40,00	100,00	100,00	●
SK 4.2 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas			100,00	●
ISK 4.2.1 Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	40,00	40,00	100,00	●
SK 5.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP			105,65	●
ISK 5.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	80,00	89,79	112,24	●



Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Triwulan I Tahun 2023	Capaian Triwulan I Tahun 2023	%	Status
ISK 5.1.2 Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	-	-	-	●
ISK 5.1.3 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	100,00	100,00	100,00	●
ISK 5.1.4 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	-	-	-	●
ISK 5.1.5 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	-	-	-	●
ISK 5.1.6 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%]	75,00	75,00	100,00	●
ISK 5.1.7 Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	-	-	-	●
ISK 5.1.8 Jumlah inovasi yang dihasilkan [Inovasi]	-	-	-	●
ISK 5.1.9 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	92,00	98,52	107,09	●
ISK 5.1.10 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	-	-	-	●
ISK 5.1.11 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	-	-	-	●

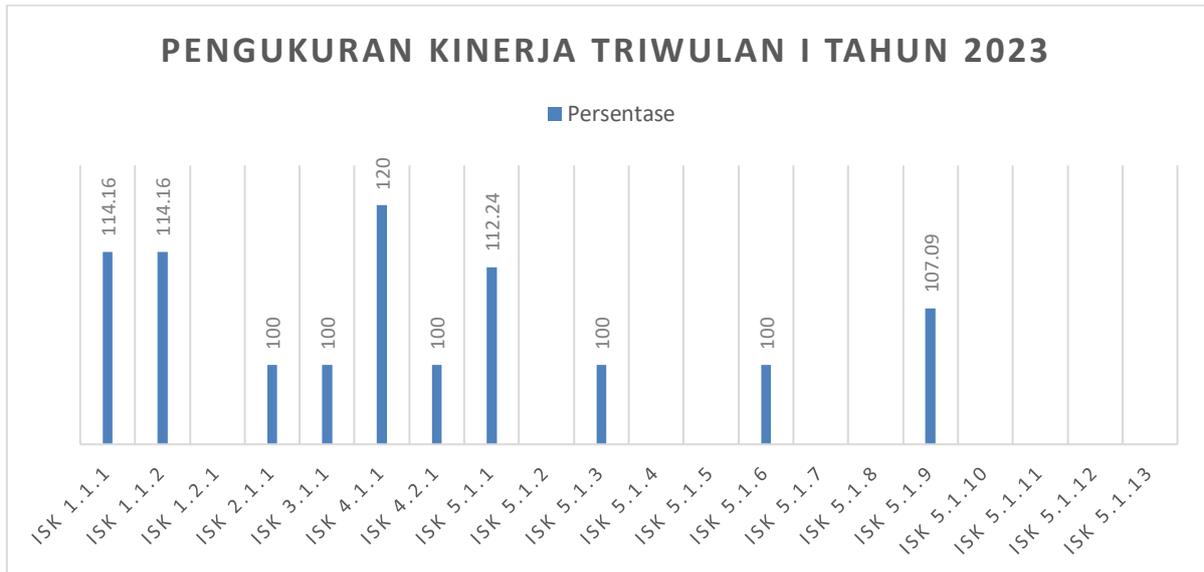


Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Triwulan I Tahun 2023	Capaian Triwulan I Tahun 2023	%	Status
ISK 5.1.12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	-	-	-	●
ISK 5.1.13 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	-	-	-	●

Penjelasan warna: ● Istimewa (Nilai 110-120) ● Baik (Nilai 90 - <110) ● Cukup (Nilai 70 - <90) ● Kurang (Nilai 50 - <70)
 ● Sangat kurang (Nilai <50) ● Belum ada penilaian

Gambar 4

Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2023, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :



**SASARAN
KEGIATAN 1.1**

**TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN
SDKP YANG EFEKTIF**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif” pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 114,16% berpredikat “Istimewa” dan diidentifikasi ke dalam 2 (dua) ISK, yaitu :

**ISK
1.1.1**

“Indeks kinerja operasi kapal pengawas”

ISK 1.1.1 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2023 sebesar 87,60. Target Kinerja ISK 1.1.1 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada **Tabel 3**. berikut ini.

Tabel 3

Target ISK 1.1.1 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Persentase 2,78%	Persentase 2,37%	Nilai Indeks 85,00	Nilai Indeks 87,60	Persentase 1,55%

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 2,78%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase 2,37%. Pada Tahun 2022, dilakukan perubahan target dengan nilai indeks sebesar 85,00. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai indeks sebesar 87,60.

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2023, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 4**. berikut ini.



Tabel 4

Hasil Capaian ISK 1.1.1 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020 (Persentase)		TW I 2021 (Persentase)		TW I 2022 (Nilai Indeks)		2023 (Nilai Indeks)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks kinerja operasi kapal pengawas	0,39%	0,39%	0,36%	0,52%	-	-	87,60	100,00	114,16

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2023 dengan nilai 86,00 telah tercapai dengan nilai 100,00 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 114,16% berpredikat “Istimewa”. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan dari waktu jenis target antara persentase dan nilai indeks pada tahun 2020 dan 2021 serta pengukuran capaian dimana pada tahun 2022 menggunakan pengukuran semester, sedangkan tahun 2023 menggunakan pengukuran triwulan. Dari segi persentase, sejak tahun 2020 hingga 2023, pada setiap Triwulan I mencapai target yang telah ditentukan. Adapun nilai Triwulan I Tahun 2023 didapat dari perhitungan pada **Tabel 5**. di bawah ini.

Tabel 5

Perhitungan “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” Triwulan I Tahun 2023

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/Realisasi	Nilai Target/Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
KP. Hiu 15	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	60	70	40	100,00
			Realisasi	65			
		Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	0	30		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,36	-	40	
			Realisasi	0,36			



Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	30	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)	Target	0	30		
			Realisasi	0			
		Dukungan Operasi Bersama (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			

Berdasarkan tabel diatas, nilai "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" Triwulan I Tahun 2023 didapat dari Kapal Pengawas Hiu 15 sebesar 100,00. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) variabel pembentuk antara lain :

1. Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan (40%) dengan nilai 40, terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan kapal perikanan (70%) dari target 60 kapal diperiksa dan realisasi 65 kapal diperiksa dengan nilai 70;
 - b. Pemeriksaan kelautan (30%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 30.
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (40%) dari target 0,36 dan realiasi 0,36 dengan nilai 40.
3. Tindak lanjut target operasi (15%) dengan nilai 15, terdiri dari:
 - a. Intercept indikasi pelanggaran (60%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60;
 - b. Dukungan kegiatan SAR (40%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai



60.

4. Dukungan operasi lainnya (5%) dengan nilai 5, terdiri dari:
 - a. Penyitaan alat tangkap terlarang (30%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 30;
 - b. Pemutusan rumpon ilegal (30%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 30;
 - c. Dukungan operasi bersama (40%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.

Tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut yang menjadi faktor keberhasilan dalam pemenuhan indikator kinerja, dengan variabel jumlah kapal yang diperiksa yang melebihi target serta persentase cakupan wilayah pengawasan yang mencapai target.

Pada tahun 2024 yang merupakan akhir periode Renstra, terdapat target pada ISK "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" dengan nilai persentase 1,55% dan diharapkan target tersebut dapat tercapai.

Gambar 5

Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2023



ISK
1.1.2

"Indeks kinerja operasi speedboat pengawas"

ISK 1.1.2 "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2023 sebesar 87,60. Target Kinerja ISK 2.1.1 "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada **Tabel 6**.



berikut ini.

Tabel 6

Target ISK 1.1.2 “Indeks kinerja operasional speedboat pengawas”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun Berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Persentase 0,07%	Persentase 0,07%	Nilai Indeks 87,50	Nilai Indeks 87,60	Persentase 0,07%

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 0,07%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase 0,07%. Pada Tahun 2022, dilakukan perubahan target dengan nilai indeks sebesar 87,50. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai indeks sebesar 87,60.

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2023, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 7**. berikut ini.

Tabel 7

Hasil Capaian ISK 1.1.2 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”
Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020 (Persentase)		TW I 2021 (Persentase)		TW I 2022 (Indeks)		TW I 2023 (Indeks)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	-	-	87,60	100,00	114,16

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2023 dengan nilai 87,60 telah tercapai dengan nilai 100,00 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 114,16% berpredikat “Istimewa”. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan dari waktu jenis target antara persentase dan nilai indeks pada tahun 2020 dan 2021 serta pengukuran capaian dimana pada tahun 2022 menggunakan pengukuran semester, sedangkan tahun 2023 menggunakan pengukuran triwulan. Dari segi persentase, sejak tahun



2020 hingga 2023, pada setiap Triwulan I mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun nilai Triwulan I Tahun 2023 didapat dari perhitungan pada **Tabel 8.** di bawah ini.

Tabel 8

Perhitungan "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" Triwulan I Tahun 2023

Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
SP. Napoleon 17	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	0	50	40	100,00
			Realisasi	0			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	50		
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0	-	40	
		-	Realisasi	0	-		
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)		Target	0	20			
		Realisasi	0				
SP. Napoleon	Jumlah Pemeriksaan	Pemeriksaan Kapal	Target	5	50	40	100,00



Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/Realisasi	Nilai Target/Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
39	Kelautan dan Perikanan (40%)	Perikanan (50%)	Realisasi	5	50		
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0			
			Realisasi	0			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00004	-	40	
			Realisasi	0,00004			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
		Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20		
Realisasi			0				
Nilai Indeks Kinerja							100,00

Berdasarkan tabel diatas, nilai "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" Triwulan I Tahun 2023 didapat dari Speedboat Pengawas Napoleon 17 dan Napoleon 39 sebesar 100,00. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) variabel pembentuk antara lain :

1. Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan (40%) dengan nilai Napoloen 17 sebesar 40 dan Napoleon 39 sebesar 40, terdiri dari:



- a. Pemeriksaan kapal perikanan (50%)
 - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 50;
 - Napoleon 39 dari target 5 kapal diperiksa dan realisasi 5 kapal diperiksa dengan nilai 50.
- b. Pemeriksaan kelautan (50%)
 - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 50;
 - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 50.
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (40%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 40 dan Napoleon 39 sebesar 40, terdiri dari:
 - Napoleon 17 belum terdapat dari target dan realisasi dengan nilai 40;
 - Napoleon 39 dari target 0,00004 dan realiasi 0,00004 dengan nilai 40.
3. Tindak lanjut target operasi (15%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 15 dan Napoleon 39 sebesar 15, terdiri dari:
 - a. Intercept indikasi pelanggaran (60%)
 - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60;
 - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60.
 - b. Dukungan kegiatan SAR (40%)
 - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40;
 - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.
4. Dukungan operasi lainnya (5%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 5 dan Napoleon 39 sebesar 5, terdiri dari:
 - a. Penyitaan alat tangkap terlarang (40%)
 - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40;
 - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.
 - b. Pemutusan rumpon ilegal (40%)
 - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40;
 - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.
 - c. Dukungan operasi bersama (20%) tidak memiliki target dan realisasi dengan nilai 40.



- Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 20;
- Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 20.

Tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut yang menjadi faktor keberhasilan dalam pemenuhan indikator kinerja, dengan variabel jumlah kapal yang diperiksa dan persentase cakupan wilayah pengawasan yang mencapai target.

Pada tahun 2024 yang merupakan akhir periode Renstra, terdapat target pada ISK "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" dengan nilai persentase 0,07% dan diharapkan target tersebut dapat tercapai.

Gambar 6

Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Triwulan I Tahun 2023



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 1.1 "Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2350.QHD dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada **Tabel 9**. sebagai berikut.

Tabel 9

Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1.1 "Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 1.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	7.952.247.000,00	2.213.018.400,00	27,83
ISK 1.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	7.482.267.000,00	2.182.893.400,00	29,17



Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
ISK 1.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	469.980.000,00	30.125.000,00	6,41

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Variabel Pembentuk

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-1.1 Tahun 2023 sebesar Rp. 7.952.247.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 2.213.018.400,- (27,83%). Dengan rincian untuk ISK 1.1.1 telah terealisasi sebesar Rp. 2.182.893.400,- dari alokasi anggaran Rp. 7.482.267.000,- dengan persentase 29,17%; dan ISK 1.1.2 telah terealisasi Rp. 30.125.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 469.980.000,- dengan persentase 6,41%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK-1.1 dan analisis terhadap realisasi anggaran, hingga akhir Triwulan I Tahun 2023 dapat disimpulkan cukup efisien dikarenakan target capaian terlaksana dengan baik dan serapan anggaran yang sesuai dengan target.

SASARAN KEGIATAN 1.2

TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan" Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

ISK 1.2.1

"Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 1.2.1 "Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKU, dengan target persentase pada tahun 2023 sebesar 100,00%. Target Kinerja ISK 1.2.1 "Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" berdasarkan Renstra



Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 10**. berikut ini.

Tabel 10

Target ISK 1.2.1 “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Persentase 100%	Persentase 100%	Persentase 100%	Persentase 100%	-

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 100,00%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase 100,00%. Pada Tahun 2022, ditentukan target persentase sebesar 100,00%. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 100,00%.

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2023, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 11**. berikut ini.

Tabel 11

Hasil Capaian ISK 1.2.1 “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020 (Persentase)		TW I 2021 (Persentase)		TW I 2022 (Persentase)		TW I 2023 (Persentase)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 1.2.1 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 1.2 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2350.RCG dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada **Tabel 12** sebagai berikut.

Tabel 12

Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1.2 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 1.2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	2.750.100.000,00	43.202.400,00	1,57
ISK 1.2.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	2.750.100.000,00	43.202.400,00	1,57

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Variabel Pembentuk

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-1.2 Tahun 2023 sebesar Rp. 2.750.100.000,-. Berdasarkan perhitungan hingga akhir Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 43.202.400,- (1,57%). Dengan rincian untuk ISK 1.2.1 telah terealisasi Rp. 43.202.400,- dari alokasi anggaran Rp. 2.750.100.000,- dengan persentase 1,57%.

SASARAN KEGIATAN 2.1

TERSELENGGARANYA PENGAWASAN PELAKU USAHA KELAUTAN YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100,00% berpredikat “Baik” dan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :



**ISK
3.1.1**

“Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan”

ISK 3.1.1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan” ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada Tahun 2023 sebesar 100,00%, dimana memiliki 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah;
- Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi;
- Kepatuhan pelaku usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut;
- Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Persentase perhitungan nilai terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: Tahapan persiapan (10%) yang dibuktikan dengan SPT, Surat pemberitahuan dan Daftar pertanyaan; Tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan Usaha dengan peraturan perundang-undangan (70%) yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan dan Formulir pemeriksaan SDK; serta Tahapan pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila kegiatan pengawasan sumber daya kelautan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%.

Target Kinerja ISK 2.1.1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada **Tabel 13**. berikut ini.

Tabel 13

Target Kinerja Komponen ISK 2.1.1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan”

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	-	-	-	RKK 1 PU Ketaatan 100%	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	-	-	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 1 PU Ketaatan 100%	-



Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	-	-	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 1 PU Ketaatan 100%	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	RKK 3 PU	RKK 15 PU Ketaatan 100%	RKK 20 PU Ketaatan 100%	RKK 20 PU Ketaatan 100%	10 PU Ketaatan 100%

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 3 pelaku usaha. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan total target 15 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2022, ditentukan target 22 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Sementara pada tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditentukan target sebesar 23 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2024, yang merupakan akhir periode Renstra, ditentukan target 10 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%.

Adapun capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 pada ISK 2.1.1 dapat dilihat pada

Tabel 14. sebagai berikut :

Tabel 14

Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK 2.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan" Triwulan I Tahun 2023

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021				TW I 2022				TW I 2023				Persen
	RKK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	-	-	1 PU	1 PU	50%	100%	-	-	-	-	1 PU	1 PU	100%	100%	100,00
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 PU	1 PU	100%	100%	100,00
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-	-	-	-	-	-	-	-	1 PU	20%	100%	-	-	-	-	-



Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021				TW I 2022				TW I 2023				Persen
	RKK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
pulau kecil dan ruang laut															
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	-	-	5 PU	5 PU	50%	100%	3 PU	3 PU	20%	100%	7 PU	7 PU	100%	100%	100,00

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Berdasarkan target kinerja Triwulan I Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian kinerja pada ISK 2.1.1 sebesar 100,00%. Dari pencapaian kinerja keempat komponen ISK tersebut, maka pada akhir Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai capaian kinerja pada SK 2.1 di aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik".

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, telah didapatkan capaian kinerja yang stabil pada setiap komponen ISK 2.1.1. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada akhir Triwulan I Tahun 2023 telah mencapai target jumlah pengawasan pelaku usaha kelautan yang ditentukan. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan dipersyaratkan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan kelautan terbaru, antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang



Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;

- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja dari keempat komponen tersebut sebagai berikut:

1) Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah

Pengawasan pencemaran perairan didasarkan kepada kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2023, terdapat target serta capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah, rincian capaian dapat dilihat pada **Tabel 15**. sebagai berikut.

Tabel 15

Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2023

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	PT. Anugerah Pasifik Internasional	Kel. Angges, Kec. Tahuna Barat, Kab. Kepl. Sangihe	Industri Pembekuan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki dokumen NIB; 2. Telah memiliki dokumen izin lingkungan berupa SPPL; 3. Telah memiliki sarana pengelolaan limbah (IPAL); 4. Selama triwulan I 2023 belum melakukan kegiatan perikanan. 	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan perizinan lingkungan

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2023 ■ TW II Tahun 2023 ■ TW III Tahun 2023 ■ TW IV Tahun 2023

Pada Triwulan I Tahun 2023, terdapat 1 (satu) pelaku usaha perikanan dan non



perikanan dalam pengelolaan limbah yang diperiksa yakni PT. Anugerah Pasifik Internasional dengan kegiatan industri pembekuan ikan. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa unit pengolahan ikan (UPI) tersebut telah memiliki dokumen perizinan berusaha dan dokumen izin lingkungan. Selain itu, UPI tersebut juga telah dilengkapi sarana pengelolaan limbah (sarana IPAL). Target pada Triwulan I Tahun 2023 tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 7

Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah Triwulan I Tahun 2023



2) Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada *taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae* dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pada Triwulan I Tahun 2023, terdapat capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan



yang dilindungi, dengan rincian capaian dapat dilihat pada **Tabel 16**. sebagai berikut.

Tabel 16

Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan
Triwulan I Tahun 2023

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Widyawati Lawendatu	Kelurahan Petta Timur, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepl. Sangihe	Penangkapan/ Pengambilan Ikan Bersirip (<i>Pisces</i>) yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam <i>Appendiks CITES</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha; 2. Pelaku Usaha telah memiliki SIPJI Perdagangan Dalam Negeri. 	Kegiatan usaha dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam dokumen perizinan

Penjelasan warna: TW I Tahun 2023 TW II Tahun 2023 TW III Tahun 2023 TW IV Tahun 2023

Pada tabel diatas realisasi pelaku usaha pemanfaatan ikan yang dilindungi, hingga akhir Triwulan I Tahun 2023 terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha atas nama Widyawati Lawendatu yang melakukan kegiatan pemanfaatan ikan yang dilindungi dengan kelompok jenis ikan Hiu dan Pari dimana dari kedua jenis ikan tersebut, terdapat beberapa spesies yang dilindungi. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pelaku usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha serta dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri. Target pada Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha dan telah memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 8

Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi Triwulan I Tahun 2023





3) Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil difokuskan pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada komponen kepatuhan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut belum terdapat target dan capaian pada Triwulan I Tahun 2023. detail capaian dapat dilihat pada **Tabel 17**. sebagai berikut :

Tabel 17

Pelaku Usaha Pemanfaatan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan nya Triwulan I Tahun 2023

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
-	-	-	-	-	-

Penjelasan warna: TW I Tahun 2023 TW II Tahun 2023 TW III Tahun 2023 TW IV Tahun 2023

Pada tabel diatas, hingga akhir Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat realisasi pelaku Usaha Pemanfaatan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang terperiksa. Hal tersebut dikarenakan target ditentukan pada Triwulan II Tahun 2023.

4) Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* didasarkan pada kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*, terdapat capaian dengan detail capaian dapat dilihat pada **Tabel 18**. sebagai berikut.



Tabel 18

Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelarangan *Destructive Fishing* yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2023

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Sulitno Akuisising	Perairan Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan pancing ulur. Hasil tangkapan ikan demersal	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
2	Dedy Baraa	Perairan Kec. Salibabu Kab. Kepl. Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan jaring insang. Hasil tangkapan ikan demersal	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
3	Petrus Manahumpia	Perairan Kec. Nusa Tabukan Kab. Kepl. Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan pancing ulur. Hasil tangkapan ikan kerapu, kurisi, dan selar	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
4	Teni Ansiga	Perairan Kec. Salibabu, Kab. Kepl. Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan pancing ulur. Hasil tangkapan ikan tuna, cakalang dan marlin	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
5	Mersis Tumambo	Perairan Kec. Melonguane, Kab. Kepl. Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan pancing ulur. Hasil tangkapan ikan tuna, cakalang, dan marlin	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
6	Donal Pontege	Perairan Kec. Lirung, Kab. Kepl. Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan pancing ulur. Hasil tangkapan ikan kuwe, kerapu, tongkol dan cakalang	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
7	Yosafat Lakupang	Perairan Kec. Tahuna Barat, Kab. Kepl. Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan jaring insang. Hasil tangkapan ikan	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan



No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
			barakuda dan kuwe	

Penjelasan warna: TW I Tahun 2023 TW II Tahun 2023 TW III Tahun 2023 TW IV Tahun 2023

Pada tabel diatas, realisasi pengawasan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* Triwulan I Tahun 2023 berjumlah 7 (tujuh) pelaku usaha atas nama Sulitno Akuisising, Dedy Baraa, Petrus Manahumpia, Teni Ansiga, Mersis Tumambo, Donal Pontege, dan Yosafat Lakupang. Dari ketujuh pelaku usaha tersebut, penggunaan alat tangkap pancing ulur dan jaring insang dengan hasil tangkapan antara lain ikan demersal dan ikan pelagis. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan indikasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Target hingga akhir Triwulan I Tahun 2023 sebesar 6 (enam) pelaku usaha dengan capaian realisasi telah diperiksa sebesar 7 (tujuh) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 9

Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelarangan *Destructive Fishing* Triwulan I Tahun 2023



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 2.1 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2352 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada **Tabel 19**. sebagai berikut.



Tabel 19

Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2.1 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	593.697.000,00	22.560.000,00	3,80
ISK 2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	593.697.000,00	22.560.000,00	3,80
	Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	465.697.000,00	17.100.000,00	3,67
	Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi			
	Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut			
	Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	78.000.000,00	5.460.000,00	7,00

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Komponen

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-1.1 Tahun 2023 sebesar Rp. 543.697.000,-. Pada akhir Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 22.560.000,- (4,15%). Dengan rincian untuk komponen “kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah”, komponen “kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi” dan komponen “kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut” telah terealisasi Rp. 17.100.000,- dari alokasi anggaran Rp. 465.697.000,- dengan persentase 3,67%; dan komponen “kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*” telah terealisasi Rp. 5.460.000,- dari alokasi anggaran Rp. 78.000.000,- dengan persentase 7,00%.

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 2.1 hingga akhir Triwulan I Tahun 2023. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK-2.1 dan analisis terhadap realisasi anggaran diperlukan



percepatan serapan anggaran dikarenakan masih berada dibawah target serapan anggaran yang ditentukan.

SASARAN KEGIATAN 3.1

TERSELENGGARANYA PENGAWASAN PELAKU USAHA PERIKANAN YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan" pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

ISK 3.1.1

"Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan"

ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase Tahun 2023 sebesar 100,00%, terdiri dari 6 (enam) detail sebagai berikut:

- Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single System*);
- Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT);
- Pengawasan importasi hasil perikanan;
- Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
- Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan (LKR);
- Pengawasan insidental.

Target Kinerja ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada **Tabel 20**. berikut ini.

Tabel 20

Target Kinerja Komponen ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan"

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan	RKK 30 PU Ketaatan 100%	RKK 30 PU Ketaatan 100%	RKK 30 PU Ketaatan 100%	RKK 10 PU Ketaatan 100%	RKK 33 PU Ketaatan 100%



Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 23 PU Ketaatan 100%	RKK 17 PU Ketaatan 100%		RKK 23 PU Ketaatan 100%
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan	RKK 14 PU Ketaatan 100%	RKK 17 PU Ketaatan 100%	RKK 18 PU Ketaatan 100%		RKK 17 PU Ketaatan 100%
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 5 PU Ketaatan 100%	RKK 1 PU Ketaatan 100%		RKK 4 PU Ketaatan 100%

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 46 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan total target 75 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2022, ditentukan target 66 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Sementara pada tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditentukan target sebesar 10 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2024, yang merupakan akhir periode Renstra, ditentukan target 10 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%.

Adapun capaian kinerja ISK 3.1.1 pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada

Tabel 21. sebagai berikut:

Tabel 21

Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan" Triwulan I Tahun 2023

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020				TW I 2021				TW I 2022				TW I 2023				Persen
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C			
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan	10 PU	10 PU	100%	100%	18 PU	18 PU	100%	100%	27 PU	28 PU	100%	100%	5 PU	5 PU	100%	100%	100,00



Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020				TW I 2021				TW I 2022				TW I 2023				Persen
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan	2 PU	2 PU	100%	100%	6 PU	6 PU	100%	100%	-	-	-	-					
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan	1 PU	1 PU	100%	100%	5 PU	5 PU	100%	100%	3 PU	3 PU	100%	100%					
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan	-	-	-	-	3 PU	3 PU	100%	100%	-	-	-	-					

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Dari segi RKK, target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 5 pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00%. Realisasi Triwulan I Tahun 2023 sebesar 5 pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Adapun dari 5 pelaku usaha yang diperiksa termasuk dalam pemeriksaan penangkapan ikan terukur dan pengawasan insidental.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya, telah didapatkan capaian kinerja yang stabil pada setiap komponen ISK 3.1.1. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada Triwulan Tahun 2023 telah mencapai target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan terbaru, antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang



Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan.
- Penerapan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan antara Dinas Perikanan Daerah Kepl. Sangihe dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya perikanan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja ISK 3.1.1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan" Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT)

Komponen "Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT)" merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan terukur. Pada Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapat karena telah melengkapi tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: 1) Tahapan Persiapan (15%) yang terdiri dari Surat Perintah Tugas; 2) Tahapan Pemeriksaan (70%) yang terdiri dari HPK Keberangkatan dan SLO untuk pemeriksaan keberangkatan serta HPK Kedatangan untuk pemeriksaan kedatangan; serta 3) Tahapan Pelaporan (15%) yang terdiri dari Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP. Apabila pemeriksaan setiap kapal perikanan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%. Sementara itu, kapal perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada **Tabel 22**. berikut ini.



Tabel 22

Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna
Triwulan I Tahun 2023

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	GT	HASIL PEMERIKSAAN	LAIK / TIDAK LAIK
1	KM. Mitra Usaha Manganitu	03111	65	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi
2	KM. Mina Maritim 160	03111	38	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi
3	KM. Jalasena 33	50133	62	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi

Penjelasan warna: TW I Tahun 2023 TW II Tahun 2023 TW III Tahun 2023 TW IV Tahun 2023

Setiap unit kapal tersebut telah diperiksa kelaikannya dan dinyatakan laik operasi. Pengawasan kapal perikanan tersebut dilakukan oleh pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna. Selain kegiatan pemeriksaan kapal perikanan, juga dilakukan kegiatan lain yang mendukung pencapaian IKU meliputi pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku laporan pangkalan yang menangkap di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Untuk kapal perikanan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dapat dilihat pada **Tabel 23**. berikut ini.

Tabel 23

Dokumen Nomor Perizinan Berusaha Kapal Perikanan dalam Penangkapan Ikan Terukur yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	NOMOR PERIZINAN BERUSAHA	INSTANSI PENERBIT
1	KM. Mitra Usaha Manganitu	03111	33.22.0001.107.61233	Ditjen Perikanan Tangkap

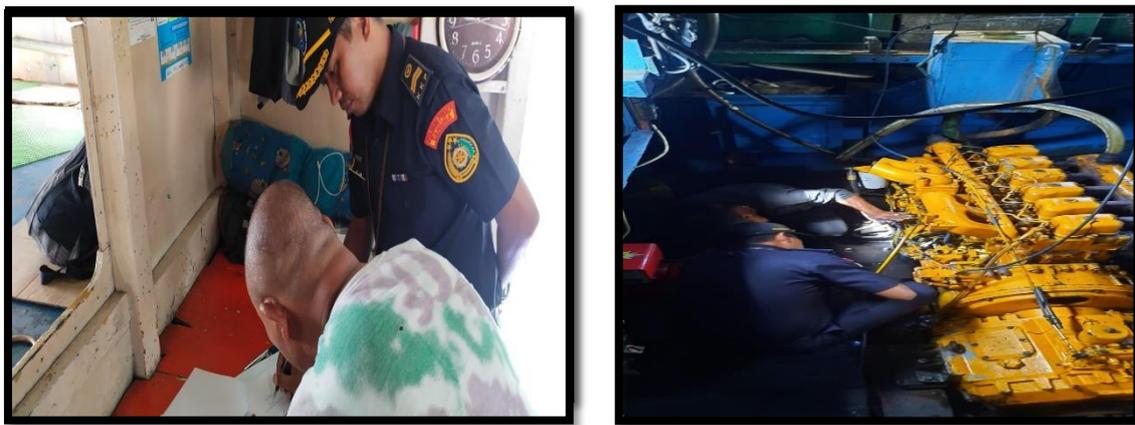


NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	NOMOR PERIZINAN BERUSAHA	INSTANSI PENERBIT
2	KM. Mina Maritim 160	03111	33.22.0001.107.56253	Ditjen Perikanan Tangkap
3	KM. Jalasena 33	50133	37.22.0001.124.60696	Ditjen Perikanan Tangkap

Dari 3 (tiga) kapal perikanan yang dilakukan pengawasan, seluruhnya telah memiliki nomor perizinan berusaha baik kegiatan kapal penangkap ikan maupun kegiatan kapal pengangkut ikan.

Gambar 10

Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Triwulan I Tahun 2023



2) Pengawasan insidental

Komponen “Pengawasan insidental” ditujukan bagi pengawasan yang berasal dari laporan masyarakat. Pada Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapat karena telah melengkapi tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: 1) Tahapan Persiapan (15%) yang terdiri dari Laporan aduan sesuai jenis pengawasan yang dilakukan; 2) Tahapan Pemeriksaan (70%) yang terdiri dari HPK Keberangkatan dan SLO untuk pemeriksaan keberangkatan serta HPK Kedatangan untuk pemeriksaan kedatangan; serta 3) Tahapan Pelaporan (15%) yang terdiri dari Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP. Apabila pemeriksaan setiap kapal perikanan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%. Sementara itu, kapal perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada **Tabel 24.** berikut ini.



Tabel 24

Pengawasan Insidental Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	GT	HASIL PEMERIKSAAN	LAIK / TIDAK LAIK
2	KM. Mina Maritim 160	03111	38	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi
3	KM. Jalasena 33	50133	62	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi

Penjelasan warna: TW I Tahun 2023 TW II Tahun 2023 TW III Tahun 2023 TW IV Tahun 2023

Setiap unit kapal tersebut telah diperiksa kelaikannya dan dinyatakan laik operasi. Pengawasan kapal perikanan tersebut dilakukan oleh pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna. Selain kegiatan pemeriksaan kapal perikanan, juga dilakukan kegiatan lain yang mendukung pencapaian IKU meliputi pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku laporan pangkalan yang menangkap di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Untuk kapal perikanan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dapat dilihat pada **Tabel 25**. berikut ini.

Tabel 25

Dokumen Nomor Induk Berusaha Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	NOMOR PERIZINAN BERUSAHA	INSTANSI PENERBIT
1	KM. Sari Segara No. 20	03111	45.22.7198.03.00435	DPMPTSP Prov. Sulut
2	KM. Lahai Roy	03111	45.23.7198.03.00113	DPMPTSP Prov. Sulut

Dari 2 (dua) kapal perikanan yang dilakukan pengawasan, seluruhnya telah memiliki nomor perizinan berusaha baik kegiatan kapal penangkap ikan maupun kegiatan kapal pengangkut ikan.



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 2.1 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan” dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2353 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada **Tabel 26**. sebagai berikut.

Tabel 26

Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3.1 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	250.000.000,00	14.082.782,00	5,63
ISK 3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	250.000.000,00	14.082.782,00	5,63

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Komponen

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-3.1 Tahun 2023 sebesar Rp. 250.000.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 14.082.782,- (5,63%).

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 3.1 pada Triwulan I Tahun 2023. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK-3.1 dan analisis terhadap realisasi anggaran diperlukan percepatan serapan anggaran dikarenakan masih dibawah target serapan anggaran yang ditentukan.

**SASARAN
KEGIATAN 4.1**

**TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SESUAI
KETENTUAN**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan” pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 108,93% berpredikat “Baik” dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:



ISK 4.1.1 **"Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"**

ISK 4.1.1 "Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada tahun 2023 sebesar 80,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 27**. berikut ini.

Tabel 27

Target ISK 4.1.1 "Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	80,00%	80,00%	-

Pada Tahun 2022 terdapat target persentase sebesar 80,00%. Sedangkan pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 80,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 28**. berikut ini.

Tabel 28

Hasil Capaian ISK 4.1.1 "Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020 (Persentase)		TW I 2021 (Persentase)		TW I 2022 (Persentase)		TW I 2023 (Persentase)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase Efektivitas Penanganan Sanksi Administratif	-	-	-	-	-	-	40,00	100,00	120,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat target sebesar 40,00% dan capaian kinerja sebesar 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 120,00% berpredikat "Istimewa". Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dibandingkan



dikarenakan ISK 4.1.1 merupakan ISK baru dan pada Tahun 2022 dilakukan pengukuran tahunan. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, tidak terdapat target yang ditetapkan. Detail kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 29**. dibawah ini.

Tabel 29
Data Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna
Triwulan I Tahun 2023

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Pelanggaran	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Pengenaan Sanksi Administratif	Tindak Lanjut
1	KM. Amazia 01 (Kapal Penangkap Ikan)	Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha	Denda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penetapan Denda Nomor B.84/DJPSDKP/PW.340/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp. 5.900.050,00 2. Nomor Surat Penerbitan Billing B.292/PSDKP.5/KU.220/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 	Dibayarkan pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 5.900,050,00
2	KM. Kelsey (Kapal Penangkap Ikan)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tidak memenuhi perizinan berusaha (melanggar daerah penangkapan ikan)	Denda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penetapan Denda Nomor B.153/DJPSDKP/PW.340/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp. 35.100.000,00 2. Nomor Surat Penerbitan Billing B.384/PSDKP.5/KU.220/II/2023 tanggal 8 Maret 2023 	Dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp. 35.100,000,00

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menjadi indikator keberhasilan adalah dengan diterbitkannya 2 (dua) Surat Penetapan Denda serta telah dibayar sesuai dengan nominal dan tanggal yang ditentukan. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tahuna telah mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif sebesar Rp. 41.000.500,00.



Tabel 30D

okumentasi Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 4.1 “Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan” dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2351.BCE.U03 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada **Tabel 31**. sebagai berikut.

Tabel 31

Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3.1 “Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan	100.000.000,00	-	-
ISK 4.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	100.000.000,00	-	-

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Komponen

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-4.1 Tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat realisasi anggaran.

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 4.1 pada Triwulan I Tahun 2023. Berdasarkan analisis terhadap



pencapaian kinerja pada SK-4.1 dan analisis terhadap realisasi anggaran diperlukan percepatan serapan anggaran dikarenakan masih belum terdapat serapan anggaran.

**SASARAN
KEGIATAN 4.2**

**TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS**

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas" pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

**ISK
4.2.1**

"Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 4.2.1 "Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada tahun 2023 sebesar 93,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 32.** berikut ini.

Tabel 32

Target ISK 5.1.1 "Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna	100%	93%	93%	93%	100%

Pada Tahun 2020 yang merupakan periode awal Renstra, ditetapkan target persentase sebesar 100,00%. Pada Tahun 2021 dilakukan review Renstra dengan target persentase berubah menjadi 93,00%. Pada Tahun 2022 ditentukan target persentase sebesar 93,00%. Pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditentukan target persentase sebesar 93,00%. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode



Renstra, ditentukan target persentase sebesar 100,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 33**. berikut ini.

Tabel 33

Hasil Capaian ISK 4.2.1 “Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna	-	-	-	-	-	50,00%	40,00%	40,00%	100,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebesar 40,00% dari target yang telah ditentukan sebesar 40,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat “Baik”. Meskipun belum terdapat kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, Stasiun PSDKP Tahuna tetap mendapat capaian sesuai target yang ditentukan dikarenakan pada manual IKU dijelaskan bahwa nilai capaian sesuai dengan nilai target apabila belum terdapat kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, capaian belum dapat dibandingkan, dikarenakan pada Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, terdapat target yang diharapkan dapat tercapai.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 4.2 “Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas” dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2351.BCE.U02 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada **Tabel 34**. sebagai berikut.



Tabel 34

Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 4.2 “Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan”

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 4.2	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	170.800.000,00	39.369.100,00	23,07
ISK 4.2.1	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	170.800.000,00	39.369.100,00	23,07

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-4.2 Tahun 2023 sebesar Rp. 170.800.000,-. Berdasarkan perhitungan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 39.369.100,- (23,07%). Dengan rincian untuk ISK 4.2.1 telah terealisasi Rp 39.369.100,- dari alokasi anggaran Rp. 170.800.000,- dengan persentase 23,07%.

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 4.2 pada Triwulan I Tahun 2023. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK-4.2 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan cukup efisien dikarenakan target capaian terlaksana dengan baik dan serapan anggaran yang sesuai dengan target.

SASARAN KEGIATAN 5.1

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” pada Tahun 2022 sebesar 105,65% berpredikat “Baik” dengan diidentifikasi ke dalam 13 (tiga belas) ISK, yaitu:

ISK 5.1.1

“Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

ISK 5.1.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik



Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” ditetapkan sebagai IKM, dengan target indeks pada Tahun 2023 sebesar sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 35**. berikut ini.

Tabel 35

Target ISK 5.1.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	80,00	80,00	80,00	84,00

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target indeks sebesar 80,00. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target indeks sebesar 80,00. Pada Tahun 2022, ditentukan target nilai indeks sebesar 80,00. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai indeks sebesar 80,00. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, ditetapkan target nilai indeks sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 36**. berikut ini.

Tabel 36

Hasil Capaian ISK 5.1.1. “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	80,00	91,75	80,00	90,63	80,00	89,79	112,24

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan I Tahun 2023 didapatkan capaian indeks sebesar 89,79 dari target indeks sebesar 80,00 dengan persentase pada aplikasi



Kinerjaku sebesar 112,24% berpredikat "Istimewa". Perhitungan ini didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 di Stasiun PSDKP Tahuna yang dihitung melalui hasil survei dari penerima layanan SLO Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) responden.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya dikategorikan lebih rendah akan tetapi stabil dikarenakan melebihi target yang ditentukan. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, terdapat target capaian nilai indeks sebesar 84,00 dan diharapkan dapat tercapai.

Indikator keberhasilan tercapainya ISK tersebut adalah tingkat kepuasan masyarakat sebesar 89,79 dengan predikat A (sangat memuaskan) dengan masing-masing komponen U1 Persyaratan dengan nilai 4,00; U2 Prosedur dengan nilai 3,86; U3 Waktu Pelayanan dengan nilai 3,94; U4 Biaya/Tarif dengan nilai 4,00; U5 Produk Layanan dengan nilai 4,00; U6 Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,97; U7 Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,97; U8 Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,91; dan U9 Penanganan Pengaduan dengan nilai 4,00.

Gambar 11

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2023





**ISK
5.1.2**

"Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 5.1.2 "Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 75,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 37**. berikut ini.

Tabel 37

Target ISK 5.1.2 "Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	75,00	75,00	-

Pada Tahun 2022, terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 75,00. Sedangkan pada tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai sebesar 75,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 38**. berikut ini.

Tabel 38

Hasil Capaian ISK 5.1.2 "Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"
Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.2 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target capaian yang ditentukan.



ISK

5.1.3

"Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 5.1.3 "Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2023 sebesar 77,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 39**. berikut ini.

Tabel 39

Target ISK 5.1.3 "Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	100%	-

Pada Tahun 2023, terdapat target persentase yang ditetapkan sebesar 100,00%. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya belum terdapat target persentase dikarenakan merupakan ISK baru. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 40**. berikut ini.

Tabel 40

Hasil Capaian ISK 5.1.3 "Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, capaian pada Triwulan I Tahun 2023 mendapat persentase 100,00% dari target persentase 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Apabila dibandingkan



dengan triwulan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan merupakan ISK baru. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target capaian persentase yang ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah dengan telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi tindak lanjut risiko yang terdapat pada matriks manajemen risiko.

Gambar 12

Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan SPIP Sebagai Salah Satu Kegiatan Manajemen Risiko



ISK
5.1.4

"Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 5.1.4 "Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai indeks pada Tahun 2023 sebesar 78,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 41**. berikut ini.

Tabel 41

Target ISK 5.1.4 "Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	72,00	73,00	77,00	78,00	74,00



Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target indeks sebesar 72,00. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target indeks sebesar 73,00. Pada Tahun 2022, ditentukan target nilai indeks sebesar 77,00. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai indeks sebesar 78,00. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, ditetapkan target nilai indeks sebesar 74,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 42**. berikut ini.

Tabel 42

Hasil Capaian ISK 5.1.4 "Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.4 dilakukan pada akhir semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, terdapat target capaian nilai yang ditentukan sebesar 74,00 dan diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur berdasarkan aktifnya peran pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan workshop baik terkait tugas pokok maupun tugas tambahan dari masing-masing pegawai.



"Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 5.1.4 "Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan



sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 90,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 43**. berikut ini.

Tabel 43

Target ISK 5.1.5 “Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target nilai sebesar 90,00. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target nilai sebesar 90,00. Pada Tahun 2022, ditentukan target nilai sebesar 90,00. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai sebesar 90,00. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, ditetapkan target nilai sebesar 90,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 44**. berikut ini.

Tabel 44

Hasil Capaian ISK 5.1.5 “Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.5 dilakukan pada akhir semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, terdapat target capaian nilai yang ditentukan sebesar 90,00 dan diharapkan dapat



tercapai dengan baik.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari tercapainya 4 aspek penilaian dengan rincian aspek kepatuhan sebesar 25%; aspek kesesuaian sebesar 25%; aspek ketercapaian sebesar 30%; dan aspek ketepatan sebesar 20%.



"Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"

ISK 5.1.6 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2023 sebesar 75,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 45**. berikut ini.

Tabel 45

Target ISK 5.1.6 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70,00%	75,00%	-

Pada Tahun 2022 terdapat target persentase sebesar 70,00%. Sedangkan pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 75,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 46**. berikut ini.



Tabel 46

Hasil Capaian ISK 5.1.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	70%	70%	75%	75%	100%

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan I Tahun 2023 didapatkan capaian persentase sebesar 75,00% dari target persentase sebesar 75,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat “Baik”. Perhitungan ini didapatkan dari perhitungan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Meskipun Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, nilai persentase sesuai dengan target sebagaimana yang dijelaskan dalam manual IKU.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya dikategorikan lebih tinggi dan stabil dikarenakan sesuai dengan target yang ditentukan. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target persentase yang ditentukan.

ISK
5.1.7

“Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

ISK 5.1.7 “Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 21,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 47**. berikut ini.



Tabel 47

Target ISK 5.1.7 “Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	21,00	21,00	-

Pada Tahun 2022 terdapat target nilai sebesar 21,00. Sedangkan pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 21,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 48**. berikut ini.

Tabel 48

Hasil Capaian ISK 5.1.7 “Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.7 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target capaian nilai yang ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari tercapainya target pada komponen penilaian 1. Tim Satker; 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); 3. Lima Menit Sebelum Jadwal; 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R); 5. Upayakan Data Terkini (UPDATE); 6. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA); 7. Tegakkan



Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT); 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA); 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK); 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP); 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS); dan 12. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (*Go Green*).

ISK
5.1.8

"Jumlah inovasi yang dihasilkan"

ISK 5.1.8 "Jumlah inovasi yang dihasilkan" ditetapkan sebagai IKM, dengan target pada Tahun 2023 sebesar 1,00 unit. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 49**. berikut ini.

Tabel 49
Target ISK 5.1.8 "Jumlah inovasi yang dihasilkan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Jumlah inovasi yang dihasilkan	-	-	1,00 unit	1,00 unit	-

Pada Tahun 2022, terdapat target yang ditetapkan sebesar 1,00 unit. Sedangkan pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target sebesar 1,00 unit. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 50**. berikut ini.

Tabel 50
Hasil Capaian ISK 5.1.8 "Jumlah inovasi yang dihasilkan" Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Jumlah inovasi yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.8 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak



terdapat target capaian yang ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari jumlah inovasi yang berhasil disusun dan berpartisipasi dalam lomba inovasi lingkup Ditjen PSDKP. Inovasi yang diusulkan dapat berupa inovasi pelayanan publik ataupun manajemen internal pelayanan perkantoran yang dapat memberikan nilai positif bagi pelayanan publik ataupun manajemen perkantoran.

ISK 5.1.9 ***"Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"***

ISK 5.1.9 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 92,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 51**. berikut ini.

Tabel 51

Target ISK 5.1.9 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	82,00%	84,00%	86,00%	92,00%	90,00%

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 82,00%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase sebesar 84,00%. Pada Tahun 2022, ditentukan target persentase sebesar 86,00%. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 92,00%. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, ditetapkan target persentase sebesar 90,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 52**. berikut ini.



Tabel 52

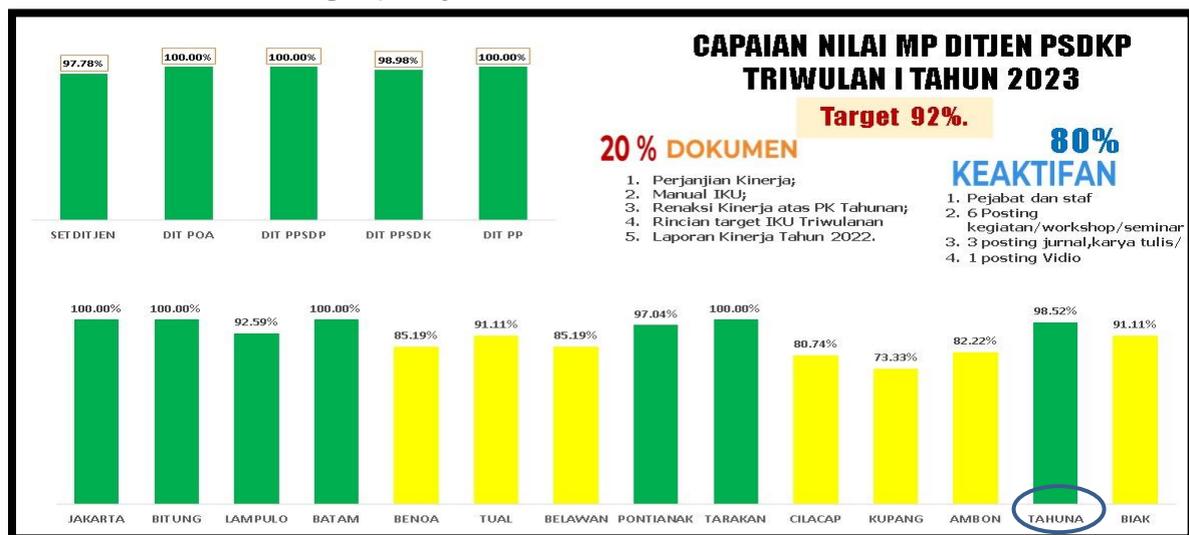
Hasil Capaian ISK 5.1.9 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	65,00%	93,33%	84,00%	100,00%	86,00%	100,00%	92,00%	98,52%	107,09

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, pada Triwulan I Tahun 2023 diperoleh capaian persentase sebesar 98,52% dari target persentase sebesar 92,00%, sehingga mendapatkan capaian persentase 107,09% pada aplikasi *Kinerjaku*. Indikator keberhasilan ISK tersebut didasarkan pada perhitungan keaktifan Kepala Stasiun, Pejabat Struktural dan minimal 2 (dua) orang staff masing-masing Sub Seksi yang melakukan postingan terkait kegiatan/karya tulis/video *campaign* pada Aplikasi *BITRIX24*. Metode penghitungan ini menggunakan Aplikasi *BITRIX24* yang merupakan aplikasi untuk mengukur Manajemen Pengetahuan yang mudah diterapkan dengan prinsip melihat seberapa banyak Unit Kerja yang menerima informasi yang disampaikan. Data dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini.

Gambar 13

Nilai Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2023





Apabila dibandingkan dengan triwulan tahun-tahun sebelumnya diperoleh persentase yang stabil dikarenakan melebihi target yang ditentukan. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, terdapat target capaian nilai 90,00% dan diharapkan dapat tercapai dengan baik.

**ISK
5.1.10**

“Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

ISK 5.1.10 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 77,50%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 53**. berikut ini.

Tabel 53

Target ISK 5.1.10 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	72,50%	75,00%	77,50%	-

Pada Tahun 2021 terdapat review Renstra dengan target persentase sebesar 72,50%. Pada Tahun 2022, ditentukan target persentase sebesar 75,00%. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 77,50%. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, tidak ditetapkan target persentase yang ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 54**. berikut ini.

Tabel 54

Hasil Capaian ISK 5.1.10 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.10 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target capaian nilai yang ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari tercapainya target dari beberapa komponen antara lain 1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 2. Tersedianya usulan penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang telah BAST; 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN kondisi rusak berat; 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 didukung BAST; dan 5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu.

ISK 5.1.11 *"Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"*

ISK 5.1.11 "Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 77,50%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 55**. berikut ini.

Tabel 55
Target ISK 5.1.11 "Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	72,50%	75,00%	77,50%	-



Pada Tahun 2021 terdapat review Renstra dengan target persentase sebesar 72,50%. Pada Tahun 2022, ditentukan target persentase sebesar 75,00%. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 77,50%. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, tidak ditetapkan target persentase yang ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 56**. berikut ini.

Tabel 56

Hasil Capaian ISK 5.1.11 "Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.11 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target capaian nilai yang ditentukan.

Indikator keberhasilan dari ISK tersebut adalah tercapainya target pada masing-masing komponen antara lain 1. Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Satker; 2. Perencanaan dan Pengarsipan Pengadaan; 3. Persentase Pemilihan; 4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan; 5. Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan 6. Persentase Tindak Lanjut.

**ISK
5.1.12**

"Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK 5.1.11 "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun



PSDKP Tahuna” ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 89,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 57**. berikut ini.

Tabel 57

Target ISK 5.1.12 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	88,00	89,00	89,00	89,00	90,00

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target nilai sebesar 88,00. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target nilai sebesar 89,00. Pada Tahun 2022, ditentukan target nilai sebesar 89,00. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai sebesar 89,00. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, ditetapkan target nilai sebesar 90,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 58**. berikut ini.

Tabel 58

Hasil Capaian ISK 5.1.12 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.12 dilakukan pada akhir semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.



Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, terdapat target nilai sebesar 90,00 dan diharapkan dapat dicapai dengan baik. Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah kualitas perencanaan anggaran dengan baik, kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang baik.

ISK 5.1.13 *"Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"*

ISK 5.1.13 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2023 sebesar 82,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 59**. berikut ini.

Tabel 59

Target ISK 5.1.12 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023 (Tahun berjalan)	Target 2024 (Akhir Renstra)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	86,00	81,00	82,00	-

Pada Tahun 2021 terdapat review Renstra dengan target nilai sebesar 86,00. Pada Tahun 2022, ditentukan target nilai sebesar 81,00. Kemudian pada Tahun 2023 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target persentase sebesar 77,50%. Pada Tahun 2024 yang merupakan akhir dari periode Renstra, tidak ditetapkan target persentase yang ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 60**. berikut ini.

Tabel 60

Hasil Capaian ISK 5.1.13 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK 5.1.13 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari capaian komponen kinerja, penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi, dan nilai efisiensi. Pada Tahun 2024 yang merupakan masa akhir periode Renstra, tidak terdapat target capaian nilai.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 5.1 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2355 dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada **Tabel 61**. sebagai berikut.

Tabel 61

Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 5.1 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP" pada Stasiun PSDKP Tahuna

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
SK 5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	7.519.949.000,00	1.178.052.784,00	15,67
ISK 5.1.2	Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	230.966.000,00	8.332.500,00	0,36
ISK 5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	95.000.000,00	9.458.821,00	9,96
ISK 5.1.10	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	45.000.000,00	-	-
ISK 5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	7.148.983.000,00	1.160.261.463,00	16,22
ISK 5.1.3	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			
ISK 5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			
ISK 5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun			



Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
	PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan			
ISK 5.1.7	Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			
ISK 5.1.8	Jumlah inovasi yang dihasilkan			
ISK 5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			
ISK 5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			
ISK 5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			
ISK 5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna			

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK-5.1 Tahun 2023 sebesar Rp. 7.519.949.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai akhir Triwulan I Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.178.052.784,- (15,67%). Dengan rincian untuk ISK 5.1.2 terdapat realisasi sebesar Rp. 8.332.500,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 230.966.000,- dengan persentase 0,36%; ISK 5.1.5 terdapat realisasi sebesar Rp. 9.458.821,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dengan persentase 9,96%; ISK 5.1.10 belum terdapat realisasi dari alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-. Sedangkan untuk ISK 5.1.1, ISK 5.1.3, ISK 5.1.4, ISK 5.1.6, ISK 5.1.7, ISK 5.1.8, ISK 5.1.9, ISK 5.1.11, ISK 5.1.12 dan ISK 5.1.13 tidak mendapat alokasi anggaran secara spesifik serta secara langsung tergabung dalam anggaran pada ISK yang lain dengan realisasi sebesar Rp. 1.160.261.463,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.148.983.000,- dengan persentase 16,22%.



C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia Dan Keuangan

Dalam pembentukan UPT Stasiun PSDKP Tahuna melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016, jumlah PNS UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berjumlah 8 (delapan) orang dan di Satwas SDKP Talaud berjumlah 1 (satu) orang. Sampai dengan awal Tahun 2023, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 31 (tiga puluh satu) ASN terdiri dari 17 (tujuh belas) ASN di Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, 3 (tiga) ASN di Satwas SDKP Talaud dan 11 (sebelas) ASN sebagai awak kapal pengawas perikanan. Selanjutnya Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 15 (lima belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah ter-input dalam aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan e-Pegawai KKP.

Informasi terkait komposisi, golongan, pangkat, pendidikan dan kualifikasi, lokasi penempatan ASN dan PPNPN dapat dilihat pada beberapa Tabel dibawah ini.

Tabel 62

Komposisi Golongan dan Kualifikasi Pendidikan ASN Stasiun PSDKP Tahuna

No	Jabatan	Golongan			Jumlah	Kualifikasi Pendidikan					Jumlah
		I	II	III		S2	S1/DIV	DIII	SMA / SMK / SUPM	SMP	
1	Kepala Stasiun	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
2	Kepala Urusan Umum	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
3	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan PP	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana Koordinasi Sarana dan Prasarana	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
5	Pejabat Fungsional	-	3	1	4	-	1	2	1	-	4
6	Pelaksana	-	14	9	23	-	6	8	9	-	23

Tabel 63

Lokasi Penempatan ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna

No	Nama	Golongan	Pangkat	Kualifikasi Pendidikan	Jabatan
A. STASIUN PSDKP TAHUNA					
1	Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si	IIIc	Penata	S2	Kepala Stasiun
2	Eman S. Monintja, S.Pi	IIIb	Penata Muda Tk. I	S1	Kaur Umum



No	Nama	Golongan	Pangkat	Kualifikasi Pendidikan	Jabatan
3	Stevenly A. Takapaha, S.Pi	IIIc	Penata	S1	Pelaksana Koord. Ops Was dan PP/Pengawas Perikanan Ahli Pertama
4	Daniel C. Tindatu, S.Pi, M.Si	IIIId	Penata Tk. I	S2	Pelaksana Koord. Sarpras/Pengawas Perikanan Ahli Muda
5	Meity Tirukan, SST	IIIId	Penata Tk. I	S1	Pranata Keuangan Penyelia/Bendahara Pengeluaran
6	Jeane N. Takasihaeng, S.Pi	IIIId	Penata Tk. I	S1	Analisis Keuangan
7	Jaswin R. Tiala	IIIb	Penata Muda Tk. I	S1	Analisis Penanganan Pelanggaran
8	Ovani S. Taunaumang, A.Md.Pi	IIIb	Penata Muda Tk. I	DIII	Pengolah Data
9	Erick Pudihang, A.Md	IIId	Pengatur Tk. I	DIII	Pengolah Data
10	Bobby C. Lahamendu	IIId	Pengatur Tk. I	SMK	Pengolah Data
11	Alvin Widyarto, A.Md	IIId	Pengatur Tk. I	DIII	Pengawas Perikanan Pelaksana
12	Donnycius Pudihang, A.Md	IIId	Pengatur Tk. I	DIII	Operator Speedboat
13	Ikhwan Hadi Suseno, A.Md.Pi	IIc	Pengatur	DIII	Pengawas Perikanan Pelaksana
14	Jundry A.D. Tinungki	IIb	Pengatur Muda Tk. I	SMK	Pengolah Data
15	Darwis A. Kantohe	IIb	Pengatur Muda Tk. I	SMK	Pengolah Data
16	Aji Apriyanto	IIa	Pengatur Muda	SUPM	Pengawas Perikanan Pemula
17	Andi Ariandi	IIa	Pengatur Muda	SUPM	CPNS
B. SATWAS SDKP TALAUD					
18	Pitron Maalua, S.Pi	IIIId	Penata Tk. I	S1	Koord. Satwas SDKP Talaud
19	Novry S. Jamis, S.Pi	IIIId	Penata Tk. I	S1	Koord. Wilker PSDKP Salibabu
20	Canisius J. Matej, S.Kel	IIIId	Penata Tk. I	S1	Pengolah Data
C. KAPAL PENGAWAS HIU 15					
21	Ardiansyah Pamuji A.Md	IIIc	Penata	DIII	Nakhoda
22	Novein E. B. Repi, A.Md	IIIc	Penata	DIII	KKM
23	Mickael C. Tolosang	IIIa	Penata Muda	SUPM	Mualim I
24	Umar Ali Salampessy	IIId	Pengatur Tk. I	SUPM	Markonis
25	Muhammad Ruslan, A.Md.Pi	IIId	Pengatur Tk. I	DIII	Masinis I
26	Edy Purwanto	IIId	Pengatur Tk. I	DIII	Masinis II
27	Noven Afrindo, S.St.Pi	IIIb	Penata Muda Tk. I	DIV	Serang
28	Muhammad Yunus	IIb	Pengatur Muda Tk. I	SUPM	Juru Mudi
29	Desryanto A. Rante, A.Md	IIc	Pengatur	DIII	Oiler I
30	Bayu Ade Putra	IIa	Pengatur Muda	SUPM	Oiler II
31	Muhammad Mizanul Abror	IIa	Pengatur Muda	SUPM	Kelasi I



Tabel 64

Daftar PPNPN di UPT Stasiun PSDKP Tahuna

No	Penempatan Kerja	Jumlah PPNPN
1	Stasiun PSDKP Tahuna	13
2	Satwas SDKP Talaud	2
Jumlah		12

Nilai pagu anggaran Tahun 2023 yang telah dianggarkan untuk lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp. 19.386.793.000,- dimana sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023, terdapat realisasi anggaran senilai Rp. 3.510.285.466,- dengan persentase 18,11%. Adapun rincian realisasi untuk Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 65**. berikut ini.

Tabel 65

Rincian Realisasi Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna

Kode	Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persen
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	10.702.347.000,-	2.256.220.800,-	21,08%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	320.800.000,-	39.369.100,-	12,27%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	593.697.000,-	22.560.000,-	3,80%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	250.000.000,-	14.082.782,-	5,63%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	7.519.949.000,-	1.178.052.784,-	15,67 %
Total Anggaran dan Realisasi		19.386.793.000,-	3.510.285.466,-	18,11%

Pada kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 2.256.220.800,- dengan persentase 21,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.702.347.000,-. Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 39.369.100,- dengan persentase 12,27% dari alokasi anggaran sebesar



Rp. 320.800.000,-. Dari kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 22.560.000,- dengan persentase 3,80% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 593.697.000,-. Dari kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 14.082.782,- dengan persentase 5,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP telah tercapai realisasi sebesar Rp. 1.178.052.784,- dengan persentase 15,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.519.949.000,-. Serapan anggaran pada Kode 2350, 2351, 2352, 2353 dan 2355 termasuk baik karena sesuai dengan target serapan Triwulan I Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 20 (dua puluh) Indikator Sasaran Kinerja (ISK), dimana Stasiun PSDKP Tahuna telah mengidentifikasi menjadi 7 (tujuh) IKU dan 13 (tiga belas) IKM yang melekat pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan pada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023.
3. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja sepanjang Triwulan I Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

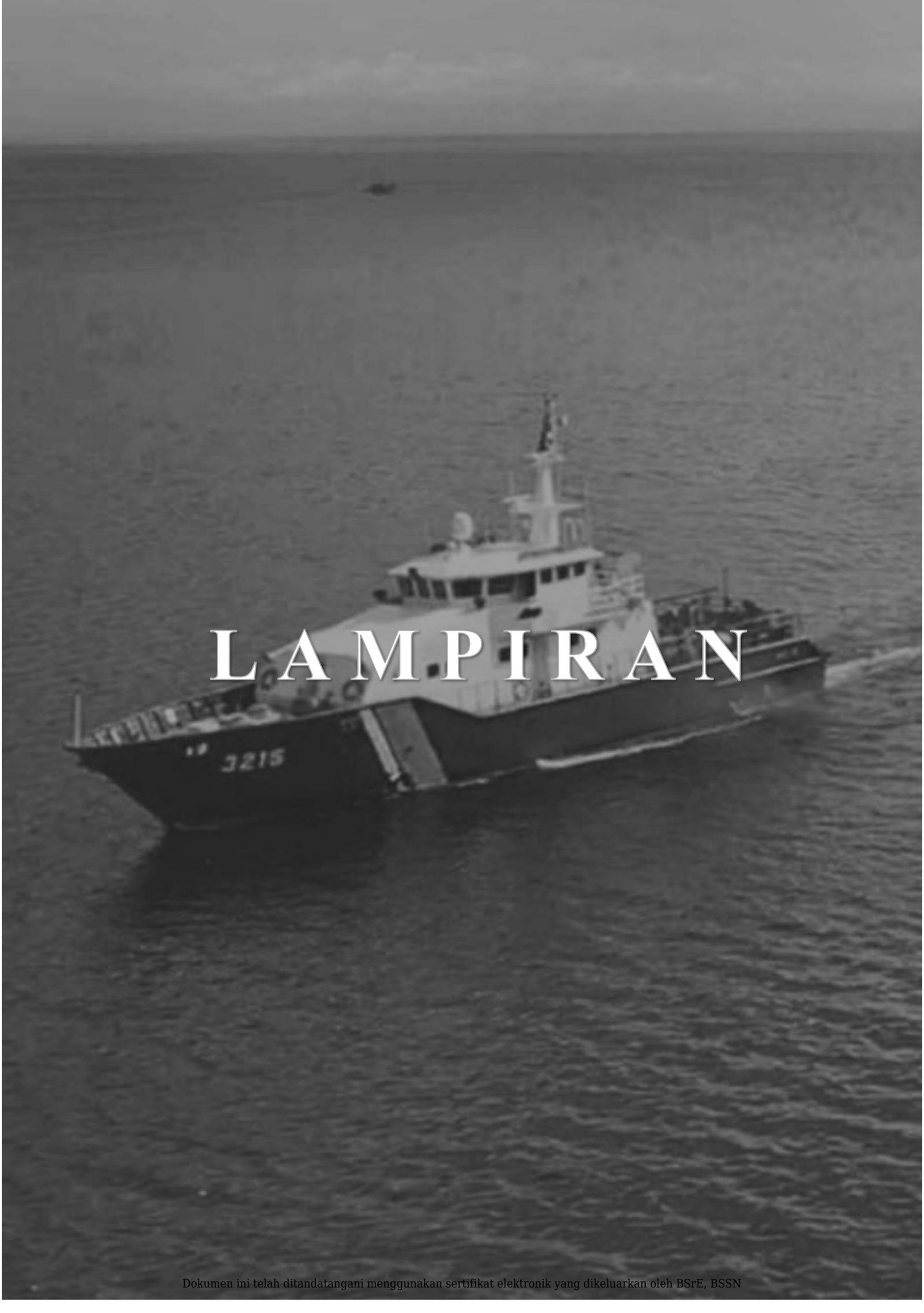
Tabel 66

Rekomendasi Penutup Dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Mempertahankan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) pada triwulan selanjutnya	Mempertahankan kualitas pelayanan agar nilai IKM SLO dapat dipertahankan atau ditingkatkan



2	Memberikan target pengawasan kelautan bagi kapal pengawas kelautan dan perikanan atau speedboat pengawas kelautan dan perikanan	Mencantumkan target pengawasan kelautan pada Rencana Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan atau speedboat pengawas kelautan dan perikanan
---	---	---

An aerial photograph of a dark-hulled ship with a white superstructure, sailing on a calm sea. The ship's hull number '3215' is visible on the bow. The word 'LAMPIRAN' is superimposed in large, white, serif capital letters across the center of the image.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.2340/PSDKP.1/TU.140/IV/2023

12 April 2023

Lampiran : 1 (dua) dokumen

Perihal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2023

Yth. (daftar terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Triwulan I Tahun 2023 khususnya capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup KKP”, berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Desember 2022 (Triwulan IV Tahun 2022) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan 31 Maret 2023 (Triwulan I Tahun 2023).
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 611/ITJ.0/TU.140/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2023, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 100% (tuntas 26 rekomendasi dari 26 total rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal PSDKP
Sekretaris Ditjen PSDKP



Ditandatangani
Secara elektronik

Suharta

Tembusan:
Dirjen PSDKP

Nomor : B.2340/PSDKP.1/TU.140/IV/2023

Tanggal : 12 April 2023

Daftar Penerima

1. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen PSDKP;
2. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP;
3. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP;
4. Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP;
5. Koordinator Kelompok Program, Ditjen PSDKP;
6. Koordinator Kelompok Keuangan dan Umum, Ditjen PSDKP;
7. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Ditjen PSDKP;
8. Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Ditjen PSDKP;
9. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen PSDKP;
10. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Ditjen PSDKP;
11. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP;
12. Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Ditjen PSDKP;
13. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap, Ditjen PSDKP;
14. Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Ditjen PSDKP;
15. Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Ditjen PSDKP;
16. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Ditjen PSDKP;
17. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Ditjen PSDKP;
18. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Ditjen PSDKP;
19. Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Ditjen PSDKP;
20. Kepala Stasiun PSDKP Biak, Ditjen PSDKP.

a.n Direktur Jenderal PSDKP
Sekretaris Ditjen PSDKP



Ditandatangani
Secara elektronik

Suharta

Lampiran Surat 1

Nomor : B.2340/PSDKP.1/TU.140/IV/2023

Tanggal : 12 April 2023

Data Rekapitulasi Capaian IKU

“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan I Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	25	25	100.00	0	0.00
2	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	1	1	100.00	0	0.00
3	Direktorat Pengawasan PSDK	0	0	-	0	-
4	Direktorat Pengawasan PSDP	0	0	-	0	-
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
6	Pangkalan PSDKP Lampulo	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Benoa	0	0	-	0	-
10	Pangkalan PSDKP Bitung	0	0	-	0	-

11	Pangkalan PSDKP Tual	0	0	-	0	-
12	Stasiun PSDKP Cilacap	0	0	-	0	-
13	Stasiun PSDKP Belawan	0	0	-	0	-
14	Stasiun PSDKP Kupang	0	0	-	0	-
15	Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	-	0	-
16	Stasiun PSDKP Tarakan	0	0	-	0	-
17	Stasiun PSDKP Tahuna	0	0	-	0	-
18	Stasiun PSDKP Ambon	0	0	-	0	-
19	Stasiun PSDKP Biak	0	0	-	0	-
Total		26	26	100.00	0	0.00

*Note: untuk satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen KKP, pengisian capaian IKU menggunakan nilai minimal yaitu 75%

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS

NOMOR 611/ITJ.0/TU.140/IV/2023

Yth : 1. Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2023

Tanggal : 10 April 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Desember 2022 (Triwulan IV Tahun 2022) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2023 (Triwulan I Tahun 2023).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2023 lingkup KKP sebesar 88,22% (tuntas 539 dari 611 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Plt. Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 611/ITJ.0/TU.140/IV/2023
Tanggal: 10 April 2023

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	6	6	100.00%	0	0.00%
2	BRSDMKP	113	106	93.81%	7	6.19%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	121	92	76.03%	29	23.97%
4	Ditjen PSDKP	26	26	100.00%	0	0.00%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	54	49	90.74%	5	9.26%
6	Ditjen PRL	131	109	83.21%	22	16.79%
7	Ditjen PDSPKP	26	23	88.46%	3	11.54%
8	BKIPM	103	97	94.17%	6	5.83%
9	Itjen	31	31	100.00%	0	0.00%
TOTAL		611	539	88.22%	72	11.78%



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : 18 April 2023
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis
Manajemen Risiko Triwulan I TA. 2023 Lingkup Ditjen. PSDKP

Yth. Sekretaris Ditjen PSDKP
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I TA. 2023 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada Triwulan II TA. 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PSDKP
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Ir. Suharta, M.Si

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP.

**LAPORAN
PERSENTASE HASIL CAPAIAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN
BERBASIS MANAJEMEN RISIKO**

**DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
TRIWULAN I TA. 2023**

**Nomor :
Tanggal : 18 April 2023**

RINGKASAN

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan I Tahun Anggaran 2023 diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TA 2023 dengan tujuan untuk: 1) memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016; 2) memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan; 3) memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan 4) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko, yaitu: 1) Proses penyusunan identifikasi risiko belum sepenuhnya dapat mengantisipasi risiko secara efektif dan efisien; 2) Pengendalian rutin belum sepenuhnya di dukung dengan bukti pengendalian; 3) Pengendalian berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan oleh Kepala Satker/Eselon I; 4) Aktivitas/kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; dan 5) Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Ketua Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP agar meningkatkan pengendalian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melengkapi data dukung SOP atau bagan arus (*flowchart*) proses bisnis dari aktivitas/kegiatan yang menjadi obyek penilaian risiko untuk kegiatan yang dikendalikan dengan pendekatan manajemen risiko; 2) menginstruksikan pemilik risiko untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana pengendalian yang telah ditetapkan; 3) menginstruksikan Tim Satgas SPIP dan Tim SPIP Satker lingkup Ditjen PSDKP agar lebih cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data pengendalian rutin, berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko; 4) menginstruksikan seluruh pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan rencana pengendalian kegiatan/aktivitas yang telah dibuat dan menyampaikan dokumen pelaksanaan kepada Tim SPIP; 5) melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap seluruh usulan perbaikan atas sisa risiko dari aktifitas pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan I TA 2023; dan 6) melaksanakan koreksi berjenjang dalam rangka penjaminan kualitas laporan penyelenggaraan SPIP. Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan I TA. 2023 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah 101% (seratus satu persen).

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	1
D. Batasan	1
BAB II HASIL	3
Persentase Hasil Capaian.....	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan persentase pengendalian kegiatan berbasis MR	3
---	---

BAB I INFORMASI UMUM

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2016;
2. Memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. Memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko terealisasi;
4. Realisasi atas rencana pengendalian risiko dapat meminimalisir risiko dan memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

1. 1 (satu) Satuan Kerja Pusat; dan
2. 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis

D. Batasan Perhitungan

1. Masa yang dievaluasi : Januari s.d. Maret 2023
2. Waktu Pelaksanaan Perhitungan : 1 Januari s.d 31 Maret 2023

3. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dihitung dengan formula, sebagai berikut:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis MR

a = Identifikasi Risiko

b = Pemantauan Pengendalian Risiko

4. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggungjawab Satker.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No.	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP: - Direktorat POA - Direktorat PPSDK - Direktorat PPSDP - Direktorat PP	33 17 12 11	38 17 12 11	115% 100% 100% 100%
2.	Pangkalan PSDKP Lampulo	28	28	100%
3.	Pangkalan PSDKP Batam	16	17	106%
4.	Pangkalan PSDKP Jakarta	23	23	100%
5.	Pangkalan PSDKP Benoa	22	22	100%
6.	Pangkalan PSDKP Bitung	9	9	100%
7.	Pangkalan PSDKP Tual	19	19	100%
8.	Stasiun PSDKP Belawan	35	35	100%
9.	Stasiun PSDKP Cilacap	39	39	100%
10.	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100%
11.	Stasiun PSDKP Pontianak	19	19	100%
12.	Stasiun PSDKP Tarakan	17	17	100%
13.	Stasiun PSDKP Tahuna	12	12	100%
14.	Stasiun PSDKP Ambon	21	21	100%
15.	Stasiun PSDKP Biak	11	11	100%
Rata-rata persentase capaian ...				101%

Selanjutnya disampaikan bahwa perhitungan persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko ini dilakukan secara terbatas pada informasi yang tertuang di dalam dokumen pemantauan pengendalian risiko yang disampaikan. Adapun kebenaran dan keabsahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pemilik risiko.

**a.n. Direktur Jenderal PSDKP
Sekretaris Direktur Jenderal PSDKP**

Ir. Suharta, M.Si